



PEMERINTAH DAERAH  
KOTA DUMAI

# EVALUASI RENCANA AKSI/RENJA

**DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

## TAHUN 2025 TRIWULAN I

0811 7771 256



Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar - Dumai



[dinkes.dumaikota.go.id](http://dinkes.dumaikota.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan HidayahNya, Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/RENJA ) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk kurun waktu Triwulan 1 tahun 2025 telah selesai disusun.

Penekanan dalam penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ( Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 ini adalah pada pencapaian sasaran prioritas Indikator Kinerja Utama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta outcome program, Kegiatan dan output sub kegiatan.

Akhirnya Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ( Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terimakasih.

Dumai, 4 April 2025  
**Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Dumai**



**dr. SYAIFUL, MKM**  
**NIP. 19710724 200112 1 004**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.....</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
2.2 Susunan Organisasi .....	6
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>8</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024.....	8
<b>BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI / RENJA</b>	
<b>SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 .....</b>	<b>10</b>
4.1 Evaluasi Rencana Aksi.....	10
4.2 Penilaian .....	17
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2025.....	17
4.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 .....	19
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>32</b>
5.1 Kaidah Pelaksanaan .....	33
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	33
 Lampiran	

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan sebagai upaya untuk menjabarkan Rencana program kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan.

**1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

## **DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

- Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
  10. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019-2024:
  11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai,
  12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E):
  13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota

## DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

- Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D): sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
  15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026
  16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 5 Seri D),
  17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)
  18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.
  19. Dokumen Rancangan Awal RPJMD kota Dumai Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2025.

Tujuan disusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas kesehatan Triwulan 1 tahun 2025 ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indicator program, sehingga diketahui kesenjangan antara target dan realisasi

pencapaian program. Hasil dan evaluasi program juga dipakai sebagai bahan informasi dasar perencanaan.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi /Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

**BAB II. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN** menjelaskan tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN** menjelaskan tentang keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025

**BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (EVALUASI RENCANA AKSI/RENJA) DINAS KESEHATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025.**

Menjelaskan tentang Evaluasi Rencana Aksi, Penilaian, Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan (Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2025, dan Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kesehatan Kota Dumai sampai dengan triwulan 1 tahun 2025.

**BAB V PENUTUP**

# **DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN**

Dinas Kesehatan Kota Dumai terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Dalam perjalanannya Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai telah empat kali mengalami perubahan, dan yang terkini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

#### **2.1. Tugas dan fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

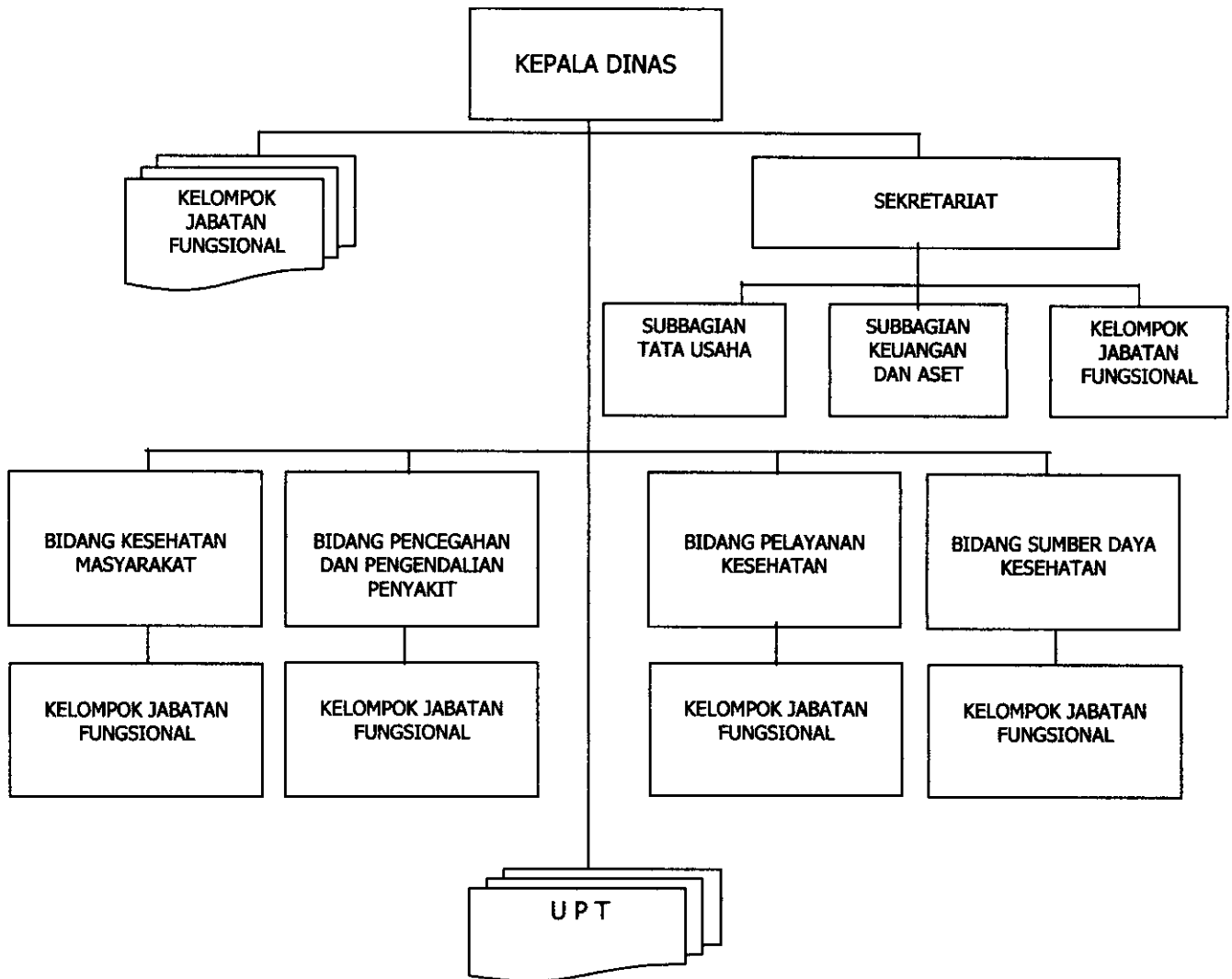
**2.2. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 tahun 2018 yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset ; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Dumai
  - a. UPT Puskesmas
  - b. UPT RSUD Kota Dumai
  - c. UPT Instalasi Farmasi Kelas A
  - d. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

# DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai



**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Aksi Tahun 2025**

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Dumai, dengan sasaran kesehatan secara Continuum of Care (dari lahir hingga lansia).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 maka dirumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah (PD). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis PD Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari sasaran dalam RPJMD Kota Dumai 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai" yang tertuang dalam Misi 2 RPJMD Kota Dumai (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu), akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah Kota Dumai serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai dan Dinas Kesehatan Kota Dumai dijabarkan sebagai berikut:

## DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai		Indek kesehatan	0.784	0.785	0.786	0.786	0.787	0.788	
		1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04	71.10	71,29 - 71.33 Thn	71,34 - 71.37 Thn	71,38 - 71.42 Thn	71,42- 71.46 Thn
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	92	92.2	97.0	100	100	100

**BAB IV**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (EVALUASI RENCANA AKSI/RENJA) DINAS KESEHATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025**

**4.1. Evaluasi Rencana Aksi**

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, dan melihat kebijakan di bidang perencanaan strategis yang telah ditetapkan di Lingkungan Dinas Kesehatan dalam menyusun peta jalan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja Dinas Kesehatan di akhir periode.

Evaluasi Pelaksanaan program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/RENJA) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indicator program, sehingga diketahui kesenjangan antara target dan realisasi pencapaian program. Hasil dan evaluasi program juga dipakai sebagai bahan informasi dasar perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2025 ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan teknik pengesanan dengan menggunakan suatu nilai standar. bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2025.

Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

## DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Tabel 4.1  
Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	8/1.000 KH
		2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	10/1.000 KH
		3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	100/100.000 KH
		4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,38-71,42 Thn
		5	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1/1.000 Penduduk
		6	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB	%	88%
		7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1%
		8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 KH	54/100.000 Penduduk
		9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1%
		10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	2%
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	100%

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, terdiri dari **Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** sebagai berikut :

**1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat:**

1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1. Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas

1.1.2. Sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

## **DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

- 1.1.3. Sub kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 1.1.4. Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas
- 1.1.5. Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 1.1.6. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 1.1.7. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 1.1.8. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 1.1.9. Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 1.1.10. Sub kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- 1.1.11. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 1.1.12. Sub kegiatan Pengadaan Obat,Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- 1.1.13. Sub kegiatan Distribusi alat Kesehatan,Obat,Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.2.1. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - 1.2.2. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  - 1.2.3. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  - 1.2.4. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
  - 1.2.5. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
  - 1.2.6. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
  - 1.2.7. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
  - 1.2.8. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  - 1.2.9. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
  - 1.2.10. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
  - 1.2.11. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

## **DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

- 1.2.12. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 1.2.13. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 1.2.14. Sub kegiatan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 1.2.15. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 1.2.16. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 1.2.17. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 1.2.18. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 1.2.19. Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 1.2.20. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 1.2.21. Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 1.2.22. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
- 1.2.23. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
- 1.2.24. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
  
- 1.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
  - 1.3.1. Sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
  
- 1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.4.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
  - 1.4.2. Sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.4.3. Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
  - 1.4.4. Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

**2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

- 2.1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
  - 2.1.1. Sub kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- 2.2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - 2.2.1. Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar
  - 2.2.2. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

**3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

- 3.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - 3.1.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 3.2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - 3.2.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 3.3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
  - 3.3.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 3.4. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

## **DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

3.4.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

3.5. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

3.5.1. Sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

### **4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

4.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.2.1. Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

4.3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.3.1. Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

### **5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

5.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

5.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

5.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

5.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

5.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD

## **DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

5.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **5.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

5.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

### **5.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

5.3.1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

5.3.2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

### **5.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

5.4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5.4.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### **5.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

5.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5.5.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.5.8. Sub Kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

### **5.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

5.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

5.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**5.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

5.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**5.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

5.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**4.2. Penilaian**

Penilaian terhadap Evaluasi rencana aksi ini dilakukan sebagai berikut :

- ❖ Penilaian periodik menggunakan form e-monev excel dari Bappeda yang disampaikan per triwulan.

**4.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2025**

Pada tahun 2025 alokasi Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan Berdasarkan hasil review Inspektorat Kota Dumai triwulan 4 Kota Dumai sebesar Rp. 235.801.304.076,08,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.38.180.965.831,- atau 16,19%. Meliputi :

- ❖ Anggaran Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp.163.559.328.774 dengan serapan Rp.32.423.130.774 atau 19,82 %
- ❖ Anggaran Program Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat sebesar Rp.67.946.439.303,08,- dengan serapan Rp.5.210.335.057,- atau 7,67 %.
- ❖ Anggaran Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp.3.027.798.799,- dengan serapan Rp.547.500.000,- atau 18,08%.
- ❖ Anggaran Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp.572.050.500,- dengan serapan Rp.0,- atau 0%.

## DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

- ❖ Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp. 695.686.700,- dengan serapan Rp.0,- sebesar 0%.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp.235.801.304.076,08,- dengan penyerapan hingga triwulan I tahun 2025 sebesar 38.180.965.831,- sebesar 16,19% dan untuk UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 Puskesmas se Kota Dumai dan UPT Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp.19.901.939.650,- realisasi hingga triwulan I tahun 2025 sebesar 4.238.689.288 (21,30%)

Anggaran APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan dialokasikan ke dalam 5 program ( terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan dan 4 urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan), dan 22 kegiatan terdiri dari 8 kegiatan penunjang urusan pemerintahan wajib dan 14 kegiatan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan). Seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.3

Pencapaian Realisasi keuangan Berdasarkan Program  
Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW 1	%
	SEMUA BIDANG			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.559.328.774	32.423.130.774	19,82
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	67.946.439.303,08	5.210.335.057	7,67
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.027.798.799	547.500.000	18,08
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	572.050.500	0	0
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	695.686.700	0	0
	JUMLAH	235.801.304.076,08	38.180.965.831,-	16,19

## DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Dari 10 Puskesmas, realisasi anggaran yang paling rendah yaitu pada BLUD puskesmas Jayamukti sebesar Rp.3.252.098.850.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 422.129.201,- atau 12,98%, dan realisasi anggaran yg terbesar yaitu pada BLUD Puskesmas Dumai Barat sebesar Rp. 1.750.000.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 491.582.629,- atau 28,09%. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan unit kerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Pencapaian realisasi Keuangan Berdasarkan unit kerja**  
**Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025**

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW 1	% CAPAIAN
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	2.542.813.000	449.053.838	17,66
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	1.750.000.000	491.582.629	28,09
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.786.500.000	477.763.106	26,74
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	3.063.345.000	849.379.164	27,73
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	1.429.618.000	229.586.845	16,06
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.520.000.000	334.641.926	22,02
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	966.000.000	228.914.864	23,70
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	3.252.098.850.000	422.129.201	12,98
9	BLUD Puskesmas Purnama	1.552.590.000	264.459.773	17,03
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.824.950.000	421.545.942	23,10
11	BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	214.024.800	69.632.000	32,53
	TOTAL	19.901.939.650	4.238.689.288	21,30

#### **4.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025**

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran IKU menggunakan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dimuat dalam Bab II.b

## DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

**Tabel 4.5**  
**Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Capaian (absolut)	Realisasi	% pencapaian kinerja
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100			100%
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	8	21	2,27	100%
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	11	24	2,60	100%
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	100	1	10,82	100%
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,38-71.42 Thn	71,78	100	100%
		2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100			100%
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1	1	0,003	100%
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88%	240	39,41	100%
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	<1%	424	0,18	100%
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	54	177	49,82	100
				3 Meningkatkan Status Gizi Balita	%	100	
3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%			1 %	7	0,03	100%
3.2 Persentase Balita dengan Gizi kurang	%			2%	124	0,60	100%
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	100 %	349.459	98,37	98,37%

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

**1.1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)**

**Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2025 Triwulan 1 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 21 kasus dari 9.239 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 2,27 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2025 adalah sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan). Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2025 yakni 8 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai triwulan I tahun 2025 masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya sangat tinggi). Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 menunjukkan fluktuasi, dimana dari tahun 2017 sampai dengan 2018 cenderung menurun, namun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat, tahun 2024 mengalami penurunan seperti terlihat pada grafik 4.6 berikut ini :

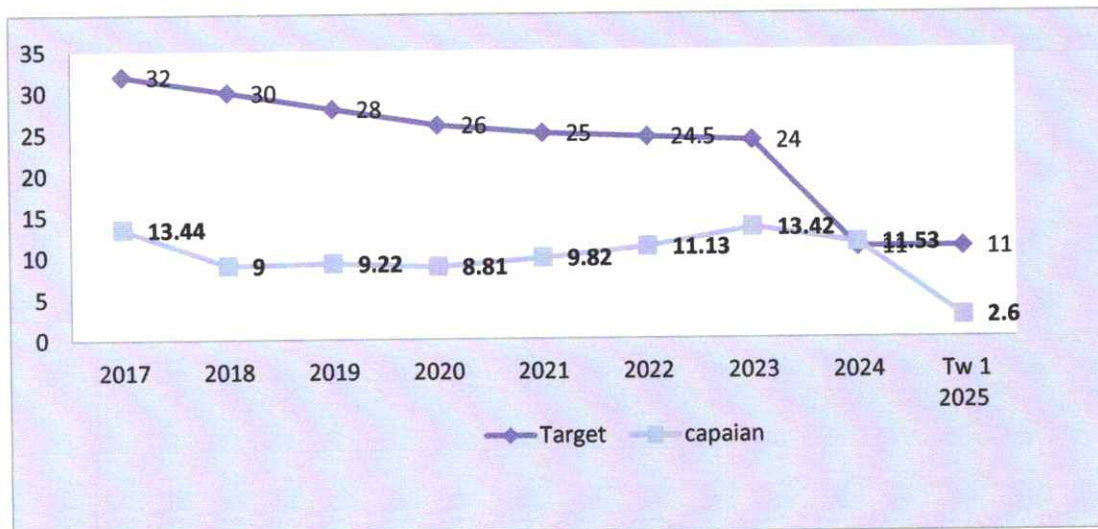
Grafik 4.6  
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai  
Tahun 2017 sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025



**Angka Kematian Balita**

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2025 Triwulan 1 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 24 kasus dari 9.239 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2025 triwulan 1 di Kota Dumai sebesar 2,60% per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2025 yakni 11 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya sangat baik). Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 menunjukkan fluktuasi, dimana dari tahun 2017 sampai dengan 2018 cenderung menurun, namun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat dan sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 13,42 per 1000 kelahiran hidup, dan tahun 2024 mengalami penurunan seperti terlihat pada grafik 4.7 berikut ini :

Grafik 4.7  
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai  
dari Tahun 2017 sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025



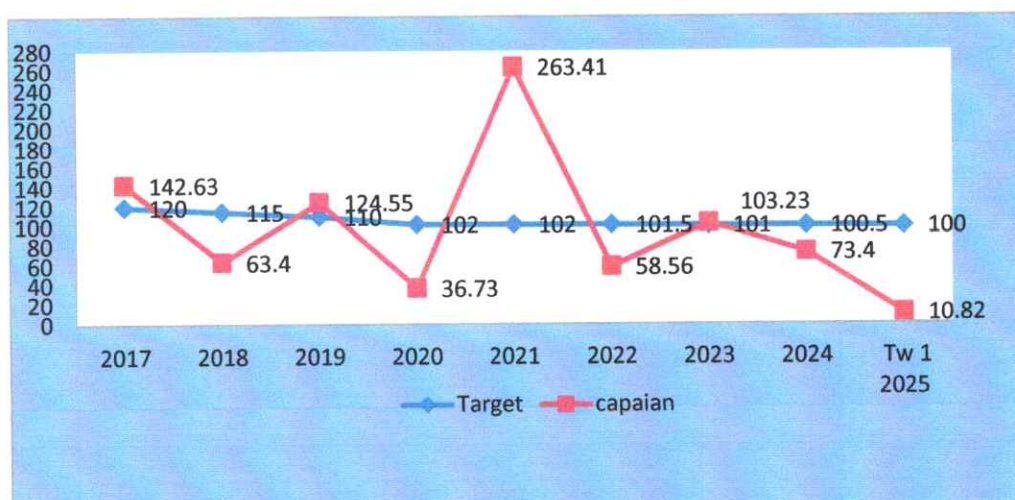
**Angka Kematian Ibu**

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan

masa nifas. Pada tahun 2025 triwulan 1 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 1 kasus dari 9.239 kelahiran hidup, dengan kondisi ibu dalam keadaan Nifas. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2025 triwulan 1 di Kota Dumai sebesar 10,82 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2025 adalah sebesar 100 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja sangat baik atau mencapai 100 %.

Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2025 yakni 100 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini telah melebihi target (yang berarti tingkat pencapaiannya sangat tinggi). Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan 2025 triwulan 1 menunjukkan fluktuasi, dimana sempat menunjukkan penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2020, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun, seperti terlihat grafik 4.8 berikut ini :

Grafik 4.8  
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai  
dari Tahun 2017 sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025

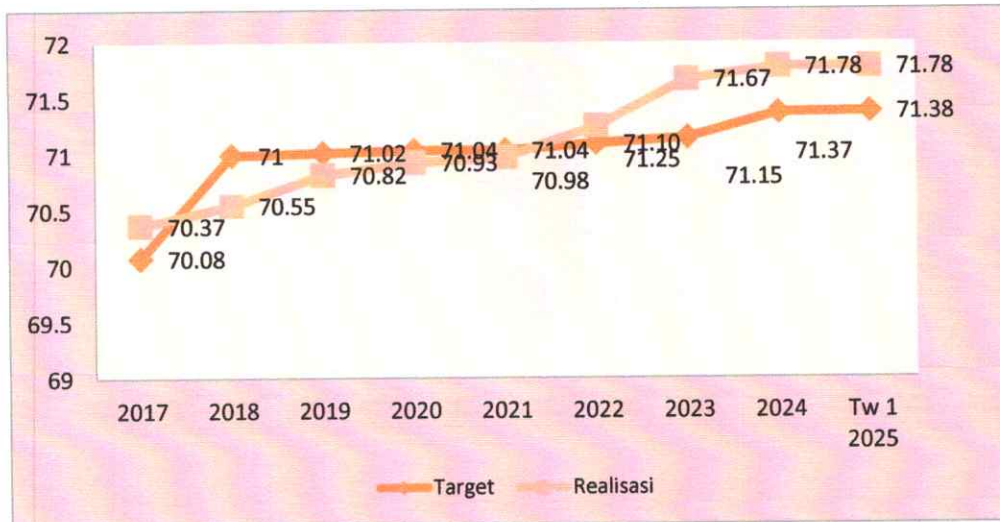


### Umur Harapan Hidup

Target kinerja Umur Harapan Hidup Kota Dumai pada tahun 2025 adalah sebesar 71,38-71,42 tahun. Realisasi pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau untuk Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 71,78 tahun. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi).

Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan 2025 tw 1 setiap tahunnya mengalami peningkatan dapat di lihat pada grafik 4.9 berikut ini :

Grafik 4.9  
Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai  
dari Tahun 2016 sampai dengan Tw 1 tahun 2025



## 1.2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

### Angka Kesakitan Malaria

Angka *Annual Parasite Incidence* (API) mengalami penurunan terlihat pada capaian tahun 2025 triwulan 1 sebanyak 1 kasus positif malaria yaitu 0,003 per 1000 penduduk . Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2025 yakni 0,1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025 cenderung statis. Seperti terlihat pada grafik 4.9 dibawah ini :

Grafik 4.10

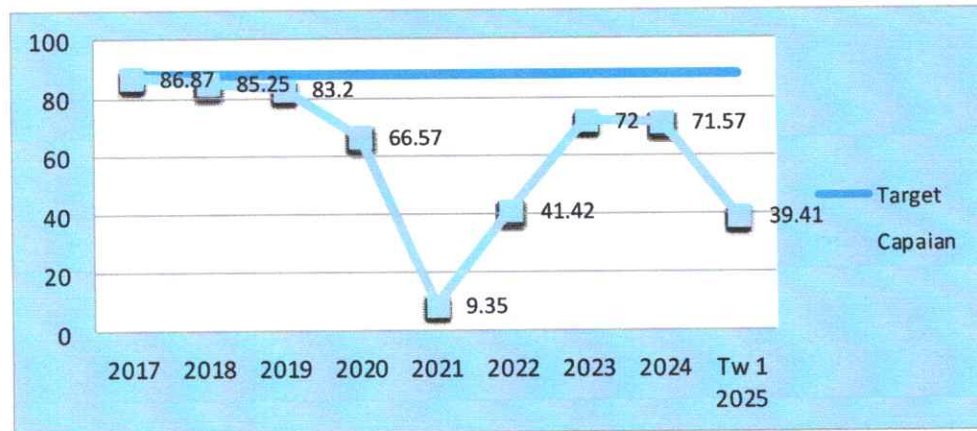
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria  
Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan tw 1 Tahun 2025



**Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +**

Angka Kesembuhan TB Paru yang dikenal sebagai cure rate, adalah indikator yang dipergunakan untuk mengevaluasi kualitas pengobatan TB paru. Dengan angka kesembuhan yang tinggi, berdampak pada penurunan prevalensi kasus TB di masyarakat dan mencegah kejadian kasus TB Multi Drug Resisten (MDR) dan XDR (Extensively Drug Resistansi), sehingga tercapai Eliminasi TB Paru tahun 2030. Pencapaian angka kesembuhan TB paru pada triwulan I tahun 2025 baru mencapai 39,41% dari target 88% artinya belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2017 sampai dengan triwulan 1 tahun 2025. Mulai tahun 2017 angka kesembuhan TB Paru menunjukkan penurunan dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan terjadi lagi peningkatan lagi dari tahun 2022 sampai tahun 2025 triwulan 1 yaitu dengan capaian 609 penderita TB paru yang sembuh dari 609 penderita TB terkonfirmasi bakteriologis yang dievaluasi atau sebesar 39,41% seperti terlihat pada grafik 4.11 berikut ini :

Grafik 4.11  
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + thn 2017 s/d Tw 1 tahun 2025



**Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko**

Hingga tahun 2025 tw 1 jumlah penderita HIV & AIDS yang masih hidup ada 424 penderita dengan prevalensi sebesar 0,18% Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2025 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi), seperti terlihat pada grafik 4.12 berikut ini :

Grafik 4.12  
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan triwulan 1 2025

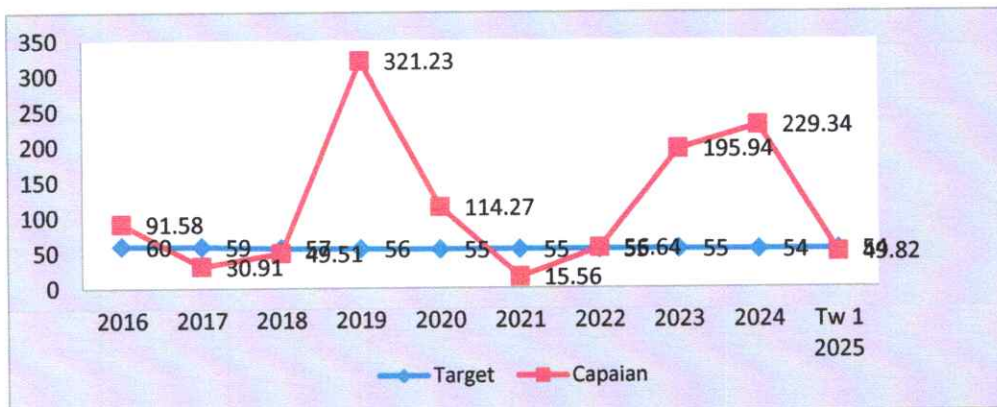


**Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)**

Masih ditemukannya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan perubahan iklim yang masih mendukung

berkembang biaknya nyamuk vektor DBD. Sekitar 80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan peningkatan kasus Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Pencapaian angka kesakitan DBD Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukan fluktuasi dimana mengalami peningkatan yang signifikan (mencapai puncak) pada tahun 2019, namun mengalami penurunan mulai tahun 2020 dan meningkat signifikan 2023 hingga tahun 2024. Pada tahun 2025 triwulan 1 angka kesakitan di Kota Dumai sebesar 49,82 per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 54 penderita dengan kematian sebanyak 3 kasus. seperti terlihat pada grafik 4.14 berikut ini:

Grafik 4.13  
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan 2025 triwulan 1



### 1.3 Meningkatnya Status Gizi Balita

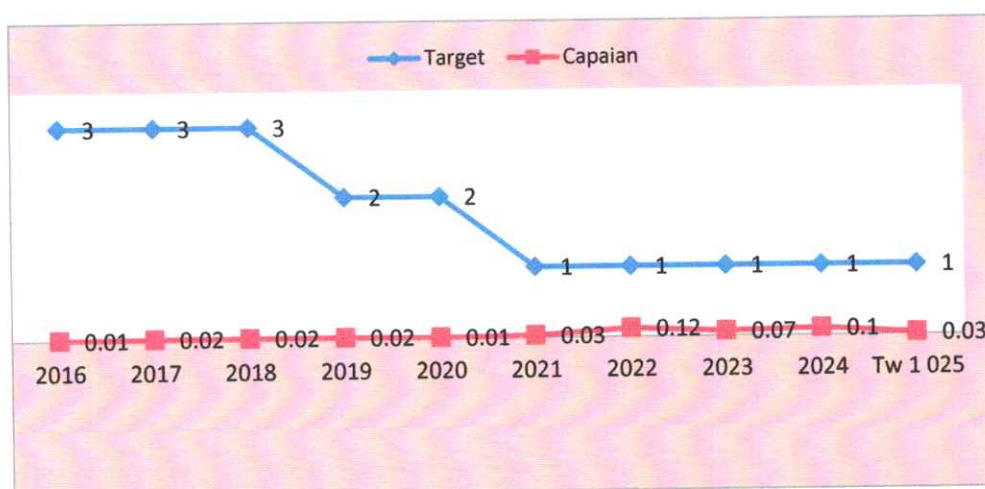
#### *Persentase Balita Dengan Gizi Buruk*

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada

dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)  $\leq 3$  standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Bila dibandingkan dengan tahun 2020 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 3 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 triwulan 1. Pada triwulan I tahun 2025 ditemukan 7 penderita buruk dari 20.615 balita ditimbang di kota Dumai dengan angka prevalensi gizi buruk 0,03%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2025 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan). Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari tahun 20167 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa Persentase Balita Dengan Gizi Buruk cenderung statis kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sampai tahun 2025 triwulan 1, seperti terlihat pada grafik 4.14 berikut ini:

Grafik 4.14  
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk  
Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan 2025 Triwulan 1



### ***Persentase Balita Dengan Gizi Kurang***

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya.

Pada tahun 2025 triwulan 1 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang (BGM) sebanyak 124 penderita dari 20.615 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang (BGM) di Kota Dumai adalah sebesar 0,60%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2025 yakni sebesar 2%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi). Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase Balita Dengan Gizi Kurang berflutuasi dan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2025 tw 1 penderita gizi kurang ditemukan sebanyak 124 penderita atau 0,60% Dengan demikian Persentase capaina kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi), seperti terlihat pada grafik 4.15 berikut ini:

Grafik 4.15  
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang  
Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan triwulan I tahun 2025



**Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat**

**2.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).**

Selain merupakan salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai, indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional juga merupakan salah satu indikator “Sustainable Development Goal’s” (SDG’s). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peserta JKN terdiri dari:

- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.

- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Peserta JKN kota Dumai tahun 2025 triwulan 1 mencapai 349.459 dari 355.256 target, Target Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai untuk tahun 2025 sebesar 100 dan persentase capaian kinerja tahun 2025 triwulan 1 adalah sebesar 98,37%, maka pencapaiannya memuaskan yaitu mencapai 98,37%. Pencapaian cakupan JKN kota Dumai cenderung stabil dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tw 1, seperti terlihat pada grafik 4.16 berikut ini :

Grafik 4.16  
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  
Kota Dumai Tahun 2017 – triwulan 1 tahun 2025



# **DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

## **BAB V PENUTUP**

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa mandiri adalah membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan sasaran yang terkait dengan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Dinas Kesehatan telah melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi pembangunan kesehatan Kota Dumai dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Dengan demikian, secara umum Dinas Kesehatan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Dengan disusunnya Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 diharapkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya dapat mendorong penyelenggaraan Program kegiatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan.

Demikian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 ini kami susun sebagai laporan dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja Dinas Kesehatan di akhir periode.

**5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2025 memuat lampiran formulir yang menguraikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mencantumkan target pelaksanaan indikator kinerja organisasi, beserta target kinerja dan anggaran dengan berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).
2. Kepala Dinas, sekretaris, Kabid dan sub koordinator berkewajiban untuk membuat target pelaksanaan indikator sasaran, outcome dan kegiatan berdasarkan Planning of action (POA) yg telah dibuat agar terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD)
3. Sebagai pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).

**5.2. Rencana Tindak Lanjut**

Memastikan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2025 dapat berjalan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan pertriwulan.

Dumai, 04 April 2025  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Dumai

  
dr. SYAIFUL, MKM  
NIP. 19710724 200112 1 004



2.2		1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	Laporan	436.150.000,00	2	Laporan	82.575.000	2	Laporan	63.320.000	0,81	38.320.000,00	-	0,00	0,00	0,81	38.320.000,00	2,81	90.895.000,00	130,26%	20,84%	
3		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4	dokumen	210.940.000,00	4	dokumen	23.800.000	3	Laporan	18.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	23.800.000,00	100,00%	11,29%	
		1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	dokumen	123.425.000,00	2	Dokumen	8.800.000	2	Dokumen	11.200.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8.800.000,00	100,00%	7,13%	
		1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	laporan	87.515.000,00	2	Laporan	15.000.000	2	Laporan	7.500.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15.000.000,00	100,00%	17,14%	
4		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	dokumen	2.363.892.896,00	1	dokumen	286.855.600	100	org	121.850.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	286.855.600,00	100,00%	11,29%	
		1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	dokumen	1.025.075.270,00	1	Dokumen	121.787.000	1	Dokumen	106.392.500	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	121.787.000,00	100,00%	11,86%	
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	46	orang	1.338.507.596,00	9	Orang	144.088.800	9	Orang	15.257.600	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	144.088.800,00	20,00%	10,78%	
5		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	dokumen	7.897.862.212,00	3	dokumen	1.283.158.871	100	org	821.084.886,00	0,20	102.601.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	1.283.158.871,00	100,00%	17,86%	
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	255.208.822,00	1	paket	25.332.100	1	paket	20.252.200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.332.100,00	100,00%	9,93%	
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	paket	2.199.928.635,00	3	paket	385.955.000	3	paket	80.046.365	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	385.955.000,00	100,00%	16,83%	
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah perlatan rumah tangga yang disediakan	3	paket	208.833.200,00	3	paket	28.392.500	3	paket	13.740.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	28.392.500,00	100,00%	13,61%	
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	paket	648.115.355,00	4	paket	56.120.000	4	paket	41.490.000	0,57	23.770.000	-	0,00	0,00	0,57	23.770.000,00	4,57	61.890.000,00	228,65%	12,67%	
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	paket	873.704.482,00	4	paket	59.063.300	4	paket	30.150.025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	59.063.300,00	133,33%	6,77%	
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	dokumen	35.392.000,00	1	Dokumen	2.855.000	1	Dokumen	2.385.000	0,37	885.000	-	0,00	0,00	0,37	885.000,00	1,37	3.540.000,00	137,11%	10,00%	
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	laporan	3.487.468.384,00	1	Laporan	714.088.471	1	Laporan	283.125.265	0,27	77.946.285	-	0,00	0,00	0,27	77.946.285,00	1,27	792.032.736,00	126,59%	22,71%	
		1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dokumen	391.403.354,00	1	Dokumen	29.554.200	1	Dokumen	39.896.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	29.554.200,00	100,00%	7,55%	
6		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	103	Unit	3.472.978.500,00	68	Unit	184.550.000	68	Unit	747.526.000	0,16	117.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	117.800.000,00	68,18	302.380.000,00	35,68%	8,71%
		1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	103	Unit	853.628.000,00	1	Unit	-	1	Unit	48.976.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	0,97%	0,00%	
		1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	58	Unit	2.619.349.500,00	57	Unit	184.550.000	57	Unit	698.550.000	0,17	117.800.000	-	0,00	0,00	0,17	117.800.000,00	57,17	302.380.000,00	98,57%	11,54%	

7			1.02.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	3 Laporan	25.561.796.779,00	3 Laporan	4.486.527.882	3 Laporan	4.548.347.500	0,29	1.299.630.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1.299.630.789,00	3,29	5.794.868.371,00	109,82%	22,87%
			1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	2.302.116.279,00	1 Laporan	416.877.882	1 Laporan	407.900.000	0,24	99.850.789	-	0,00	0,00			0,24	99.850.789,00	1,24	516.528.371,00	124,43%	22,44%
			1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 laporan	4.417.688.500,00	1 Laporan	400.450.000	1 Laporan	284.767.500	0,70	198.380.000	-	0,00	0,00			0,70	198.380.000,00	1,70	598.830.000,00	84,83%	13,56%
			1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	18.841.991.000,00	1 Laporan	3.878.000.000	1 Laporan	3.855.700.000	0,26	1.001.500.000	-	0,00	0,00			0,26	1.001.500.000,00	1,26	4.679.500.000,00	41,99%	24,84%
8			1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	23 Unit	8.016.038.306,00	100 Unit	837.150.794	100 Unit	5.047.438.229	0,41	424.680.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	424.680.229,00	100,41	1.261.740.933,00	496,66%	16,74%
			1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	22 Unit	3.790.878.305,00	21 Unit	427.883.804	21 Unit	454.664.229	0,38	172.988.229	-	0,00	0,00			0,38	172.988.229,00	21,38	800.871.833,00	97,18%	15,85%
			1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	4.224.060.000,00	1 Unit	409.267.100	1 Unit	592.772.000	0,42	251.802.000	-	0,00	0,00			0,42	251.802.000,00	1,42	880.869.100,00	142,44%	15,86%
8			01-02-02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86 %	392.768.164.438,00	100 %	39.866.090.168	100 %	67.946.439.302,00	0,08	6.210.336.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	6.210.336.057,00	100,08	48.196.336.218,00	116,37%	11,80%
1			1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Sarana	138.279.861.620,00	12 Sarana	16.041.680.884	12 Sarana	16.826.924.313	0,13	1.999.896.467	0,00	-	-	0,00	-	0,13	1.999.896.467,00	12,13	17.041.887.461,00	101,07%	12,32%
			1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat yang dibangun	5 unit	49.538.894.000,00	1 Unit	2.884.035.971	1 Unit	756.139.807	0,66	496.106.807	-	0,00	0,00			0,66	496.106.807,00	1,66	3.182.142.776,00	33,12%	6,42%
			1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	17 unit	7.984.274.000,00	2 Unit	15.961.800	2 Unit	670.832.906	0,30	199.950.000	-	0,00	0,00			0,30	199.950.000,00	2,30	215.911.800,00	13,52%	2,70%
			1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Kesehatan yang Di bangun	12 unit	4.800.000.000,00	2 Unit	9.978.900	2 Unit	237.888.600	-	-	-	0,00	0,00			-	-	2,00	9.978.900,00	16,87%	0,21%
			1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	10 unit	6.390.217.560,00	4 Unit	964.541.000	4 Unit	254.858.000	0,78	199.950.000	-	0,00	0,00			0,78	199.950.000,00	4,78	1.164.491.000,00	47,85%	18,34%

1.02.02.2.01.0007	Pembinaan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun termasuk dan SGM agar sesuai standar	504 unit	17.261.000.000,00	83 LHM	1.737.256.000	83 LHM	1.066.816.500	0,29	306.350.000	-	0,00	306.350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%	16,53%	2.046.638.000,00	100,00%	83,29
1.02.02.2.01.0008	Pembinaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan peralatan yang akan dibangun yang akan memberikan manfaat kesehatan oleh Puskesmas	10 unit	9.086.926.793,00	5 LHM	963.615.000	5 LHM	34.891.860	1,00	34.891.860	-	0,00	34.891.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%	80,00%	968.798.650,00	100,00%	6,00
1.02.02.2.01.0010	Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan peralatan yang telah dibangun kesehatan oleh Puskesmas Lainnya	47 unit	11.897.208.870,00	21 LHM	1.339.803.000	21 LHM	478.634.000	0,42	199.900.000	-	0,00	199.900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%	46,71%	1.539.503.000,00	100,00%	21,42
1.02.02.2.01.0011	Pembinaan Puskesmas Desa	Jumlah sarana dan prasarana/Chase yang dibangun dan pemeliharaan	10 unit	1.710.000.000,00	1 LHM	189.935.000	1 LHM	9.965.000	-	-	-	0,00	9.965.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	189.835.000,00	100,00%	1,00
1.02.02.2.01.0014	Pembinaan Alat Kesehatan/Pengujian Makanan/Pemeriksaan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan Alas Pengujian Makanan/Pemeriksaan Kesehatan yang dibangun	957 unit	10.857.796.232,00	114 LHM	2.146.410.851	114 LHM	2.787.632.400	0,18	499.750.000	-	0,00	499.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%	24,82%	2.646.160.851,00	100,00%	114,16
1.02.02.2.01.0015	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah Peningkatan dan Peningkatan alat uji dan kalibrasi pada unit pelayanan kesehatan Puskesmas center	290 unit	547.515.000,00	286 LHM	-	286 LHM	136.606.000	0,43	58.910.000	-	0,00	58.910.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	10,78%	58.910.000,00	100,00%	286,43
1.02.02.2.01.0020	Berkas Alat Kesehatan/Alat Pengujian Makanan/Pemeriksaan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pengujian Makanan/Pemeriksaan Kesehatan yang	10 unit	979.000.000,00	36 LHM	116.614.652	36 LHM	116.182.000	-	-	-	0,00	116.182.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00%	12,14%	116.614.652,00	100,00%	36,00
1.02.02.2.01.0023	Pembinaan Obat, bahan habis pakai, Bahan medis, Pakas, Vaksin, Imunisasi dan tindakan yang diperlukan	Jumlah obat dan vaksin habis pakai, Vaksin, Imunisasi dan tindakan yang diperlukan	4 paket	17.264.792.166,00	4 paket	4.702.914.520	4 paket	8.988.654.460	-	-	-	0,00	8.988.654.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	27,21%	4.702.914.520,00	100,00%	4,00
1.02.02.2.01.0026	Obat, bahan habis pakai, habis pakai, bahan medis, Bahan, obat, vaksin, tindakan dan tindakan ke	Obat, bahan habis pakai, habis pakai, bahan medis, Bahan, obat, vaksin, tindakan dan tindakan ke	10 paket	80.225.000,00	10 Paket	169.390.600	10 Paket	71.733.000	-	-	-	0,00	71.733.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	211,14%	169.390.600,00	100,00%	10,00
1.02.2.02	Kesehatan untuk Uhid dan UHF Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesehatan untuk Uhid dan UHF Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10 mas	227.250.116.811	10 mas	23.641.212.291	10 Putelem as	61.011.312.072	0,88	3.137.603.600	0,08	0,08	3.137.603.600	10,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	100,82%	11,79%	26.778.916.891,00	100,82%	10,08
1.02.2.02.0001	Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	977 orang	1.616.003.900,00	968 orang	71.699.600	968 orang	82.670.000	-	-	-	0,00	82.670.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69%	3,95%	71.699.600,00	100,00%	9,68
1.02.2.02.0002	Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	938 orang	1.528.704.444,00	938 orang	164.617.472	938 orang	120.786.000	-	-	-	0,00	120.786.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53%	12,00%	164.617.472,00	106,53%	9,38
1.02.2.02.0003	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan	6885	1.101.682.882,00	9537 orang	149.800.100	9537 orang	78.464.000	-	-	-	0,00	78.464.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,34%	13,60%	149.800.100,00	107,34%	9,537
1.02.2.02.0004	Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan	36.805	1.464.611.300,00	25986 orang	211.693.600	25986 orang	70.777.800	-	-	-	0,00	70.777.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%	14,28%	211.693.600,00	70,49%	25,986
1.02.2.02.0006	Kesehatan pada umur mendapatkan pelayanan	Jumlah anak umur mendapatkan pelayanan	62192	1.323.267.400,00	62722 orang	29.782.400	62722 orang	66.866.000	-	-	-	0,00	66.866.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66%	2,26%	29.782.400,00	100,66%	62,722

1.02.02.2.02.0008	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.124.872.880,00	221241 org	47.486.800	221241 org	244.880.000	-	-	0,00	0,00	-	-	221.241,00	47.486.500,00	108,72%	4,22%		
1.02.02.2.02.0007	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15860	723.388.000,00	24179 org	96.880.280	24179 org	26.500.080	-	0,00	0,00	0,00	0,00	24.179,00	96.880.300,00	154,50%	13,80%		
1.02.02.2.02.0008	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73.849	889.869.900,00	78271 org	98.792.200	78271 org	66.438.000	-	0,00	0,00	-	-	78.271,00	98.792.200,00	107,20%	14,03%		
1.02.02.2.02.0006	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73946	1.121.725.800,00	4172 org	582.404.721	4172 org	65.807.116	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00	582.404.721,00	5,84%	51,82%		
1.02.02.2.02.0010	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	3.892	962.718.800,00	529 org	68.272.800	529 org	62.842.000	-	0,00	0,00	-	-	529,00	68.272.800,00	13,56%	11,02%		
1.02.02.2.02.0011	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	644	1.831.280.700,00	6471 org	71.474.841	6471 org	1.117.088.760	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,00	71.474.841,00	1188,52%	4,38%		
1.02.02.2.02.0012	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertular HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8.014	2.200.817.500,00	13070 org	410.584.000	13070 org	301.732.800	-	0,00	0,00	-	-	13.070,00	410.584.000,00	183,08%	18,88%		
1.02.02.2.02.0013	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Kondisi Kojakan Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengalokasian pelayanan kesehatan bagi perokok pada kondisi kajoakan luar biasa (KLB) sesuai standar	0.413	10.778.002.708,00	1 Dokumen	438.488.044	1 Dokumen	285.903.582	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	438.488.044,00	0,01%	4,05%		
1.02.02.2.02.0016	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengalokasian pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 dokumen	9.389.278.748,00	1 Dokumen	336.367.748	1 Dokumen	2.280.446.800	0,25	570.078.000	-	0,00	0,00	0,25	570.078.000,00	1,25	906.436.748,00	128,00%	9,87%
1.02.02.2.02.0016	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								-	0,00	0,00	-	-						
1.02.02.2.02.0017	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengalokasian pelayanan kesehatan lingkungan	4 dokumen	3.348.483.800,00	4 Dokumen	391.810.000	6 Dokumen	181.104.800	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	391.810.000,00	100,00%	11,70%		
1.02.02.2.02.0018	Pengalokasian Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengalokasian pelayanan promotif kesehatan	1 dokumen	1.784.034.008,00	1 Dokumen	282.888.500	1 Dokumen	221.782.200	-	0,00	0,00	-	-	1,00	282.588.500,00	100,00%	16,11%		
1.02.02.2.02.0020	Pengalokasian Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengalokasian surveilans kesehatan	1 dokumen	3.534.874.180,00	1 Dokumen	488.782.837	1 Dokumen	282.826.149	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	488.782.837,00	100,00%	13,21%		

			1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 dokumen	5.250.913.500,00	1	Doku men	722.196.919	1	Dokumen	624.130.750	0,55	341.865.500	-	0,00	0,00	0,55	341.865.500,00	1,55	1.063.862.419,00	154,74%	20,28%	
			1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 dokumen	167.623.854.336,00	1	Doku men	18.409.010.343	1	Dokumen	43.816.257.095	0,05	2.143.869.600	-	0,00	0,00	0,05	2.143.869.600,00	1,05	20.552.879.843,00	104,89%	12,25%	
			1.02.02.2.02.0029	Penyenggaraan Kalsipen/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 dokumen	119.999.704,00	1	Doku men	18.936.000	1	Dokumen	22.441.361	-	-	0,00	0,00	-	1,00	18.936.000,00	100,00%	15,78%			
			1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									80.767,000	-	-	0,00	0,00	-							
			1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan genetik darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public safety center (PSC) 119 tersedia, terlokalisasi dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan genetik darurat terpadu (SPGDT)	1 unit	9.725.300.900,00	1	Unit	383.362.800	1	Unit	646.628.920	0,13	81.990.500	-	0,00	0,00	0,13	81.990.500,00	1,13	465.383.100,00	112,88%	4,79%	
			1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.481 orang	485.855.555,00	1488	org	68.603.988	1488	org	100.105.000	-	-	0,00	0,00	-	1.488,00	68.603.988,00	100,47%	14,12%			
			1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	560 orang	190.000.000,00	609	org	41.575.000	609	org	31.971.200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	41.575.000,00	108,75%	25,98%		
			1.02.02.2.02.0042	Pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan malaria	2 orang	144.900.000,00	2	org	60.480.580	2	org	12.650.000	-	-	0,00	0,00	-	2,00	60.480.580,00	100,00%	41,74%			
			1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak								113.000,000	-	-	0,00	0,00	-				0,00%	0,00%		
3			1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	13 Sarana	1.782.704.688,00	12	sarana	120.911.900	12	sarana	97.360.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	12,00	120.911.800,00	92,31%	6,78%	
			1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	8 dokumen	1.782.704.688,00	8	Doku men	120.911.900	8	Dokumen	97.360.000	-	-	0,00	0,00	-	8,00	120.911.800,00	100,00%	6,78%			
4			1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	103 Sarana	24.676.387.649,00	103	Sarana	1.182.667.673	103	Sarana	1.210.852.917,00	0,06	72.833.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	72.833.000,00	103,06	1.224.920.073,00	100,06%	4,92%
			1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Poliklinik Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibandikan, diawasi dan tidak lanjut perizinannya	18 unit	270.829.000,00	18	Unit	22.500.000	20	Unit	53.142.000	-	-	0,00	0,00	-	18,00	22.500.000,00	100,00%	8,31%			

			1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	75 unit	526.248.623,00	75 Unit	81.000.000	107 Unit	30.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	75,00	81.000.000,00	100,00%	15,36%	
			1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (NIM) pelayanan kesehatan	11 unit	23.210.659.926,00	11 Unit	769.353.073	11 Unit	985.652.717	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	11,00	769.353.073,00	100,00%	3,31%	
			1.02.02.2.04.0004	Persiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyajian perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 dokumen	867.750.000,00	2 Dokumen	279.234.000	2 Dokumen	142.058.200	0,51	0,00	-	0,00	0,51	72.833.000,00	2,51	352.067.000,00	125,83%	40,57%	
C			01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan pertanyaannya sesuai standar	86 %	27.848.656.700,00	100 %	4.380.690.890	100 %	3.027.798.789,00	0,18	0,00	-	0,00	0,18	847.500.000,00	100,18	4.828.050.890,00	117,88%	17,89%	
1			1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tempat praktik tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan pertizinan	140 tempat	404.800.000,00	30 Tempat	12.150.000	30 Tempat	36.950.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	30,00	12.150.000,00	21,43%	3,00%	
			1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1 dokumen	404.500.000,00	1 Dokumen	12.150.000	1 Dokumen	36.850.000	-	0,00	-	0,00	-	-	1,00	12.150.000,00	100,00%	3,00%	
2			1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	10 Puskesmas	26.493.254.900,00	10 Puskesmas	3.791.841.270	10 Puskesmas	2.603.981.799	0,22	0,00	-	0,00	0,22	547.500.000,00	10,22	4.338.141.270,00	102,19%	16,38%	
			1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	325 orang	25.038.826.500,00	125 org	3.606.000.000	125 org	2.342.900.000	0,23	0,00	-	0,00	0,23	547.500.000,00	125,23	4.155.500.000,00	38,53%	16,80%	
			1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 dokumen	1.454.428.400,00	2 Dokumen	183.641.270	2 Dokumen	161.061.799	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2,00	185.841.270,00	100,00%	12,65%	
3			1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	24 kegiatan	650.900.800,00	1 Dokumen	576.759.420	1 Dokumen	487.987.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	576.759.420,00	4,17%	88,61%	
			1.02.03.2.02.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	850 orang	650.900.800,00	150 Orang	576.759.420	150 Orang	487.987.000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	150,00	576.759.420,00	17,85%	88,61%	
C			01:02:04	PROGRAM BEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	85 %	6.890.671.873,00	80 %	851.361.997	80 %	572.050.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	80,00	851.361.997,00	84,12%	12,08%	
1			1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optik, UMOT yang memenuhi persyaratan pertizinan	118 Sarana	1.682.225.000,00	117 Sarana	126.673.900	117 Sarana	37.867.500	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	117,00	126.673.900,00	99,15%	8,16%
			1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pertizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optik, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	3 dokumen	1.552.225.000,00	3 Dokumen	126.673.900	3 Dokumen	37.867.500	-	0,00	-	0,00	-	-	3,00	126.673.900,00	100,00%	8,16%	
2			1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan pertizinan	250 Sarana	1.194.890.315,00	50 Sarana	348.108.400	50 Sarana	192.259.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	348.108.400,00	29,00%	29,13%	

			1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Terlembu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Terlembu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1.194.890.315,00	1 Dokumen	348.109.400	1 Dokumen	162.259.000	-							0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	348.109.400,00	100,00%	29,13%
			1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Lait Higienitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TPPM	4 dokumen	1.818.908.234,00	4 Dokumen	114.456.807	4 Dokumen	90.359.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	114.456.807,00	100,00%	6,29%	
			1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lait Higienitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lait Higienitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 dokumen	1.818.908.234,00	4 Dokumen	114.456.807	4 Dokumen	90.359.200	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	114.456.807,00	0,00%	6,29%	
			1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	743.553.824,00	1 Dokumen	91.238.800	1 Dokumen	77.144.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	91.238.800,00	100,00%	12,27%		
			1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	743.553.824,00	1 Dokumen	91.238.800	1 Dokumen	77.144.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	91.238.800,00	100,00%	12,27%		
			1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1.571.398.500,00	1 Dokumen	150.883.000	1 Dokumen	174.420.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	150.883.000,00	100,00%	9,80%	
			1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produk makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	30 unit	1.571.398.500,00	30 Unit	150.883.000	30 Unit	174.420.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150.883.000,00	100,00%	9,80%	
			01:02:06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	4,68 1000 balita	193.529.646.994,00	80 %	2.326.124.033	80 %	696.696.700,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.326.124.033,00	1700,40%	1,20%	
			1.02.06.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kamtibmas, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga slaga aktif	36 keluarga aktif	3.791.839.500,00	117 Sarana	1.927.886.800	117 Sarana	243.758.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	1.927.886.800,00	325,00%	50,84%	
			1.02.06.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kamtibmas dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kamtibmas dan pemberdayaan masyarakat	6 dokumen	3.791.839.500,00	6 Dokumen	1.927.886.800	6 Dokumen	243.758.800	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.886.800,00	100,00%	50,84%	
			1.02.06.2.02	Pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS	80 rumah tangga	1.194.998.400,00	80 Sarana	54.207.860	80 Sarana	169.690.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	54.207.860,00	0,12%	4,54%	
			1.02.06.2.02.0002	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	42579 RT	1.194.998.400,00	38262 keluarga	54.207.860	38262 keluarga	169.690.200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.262,00	54.207.860,00	89,86%	4,54%	

3		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	198.842.808.084	3 Dokumen	344.029.573	3 Dokumen	282.267.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	344.029.573,00	1,82%	0,18%
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	197 posyandu	2.292.278.800,00	3 Dokumen	344.029.573	3 Dokumen	282.267.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	344.029.573,00	1,82%	16,01%
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS										214.024.800		43.904.500							43.904.500		215.793.297		0
A		01:02:01	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	644.020.080,00	100 %	171.878.797	100 %	214.024.800,00	0,21	43.904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	43.904.500,00	100,21	215.793.297,00	100,21%	35,61%
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A)	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	644.020.080,00	1 unit kerja	171.878.797	1 Unit	214.024.800	0,21	43.904.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,21	43.904.500,00	1,21	215.793.297,00	120,51%	33,51%	
Puskesmas Medang Kampal										1.648.145.950,00	0,04	77.597.903,00	0,00	-	0,00	-	0,04	77.597.903,00	0,04	1.400.264.196,00	0,00%	0,22	
A		01:02:01	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	6.503.843.826,00	100 %	1.322.666.293	100 %	1.429.618.000,00	0,06	77.597.903	0,00	-	0,00	-	0,06	77.597.903,00	100,06	1.400.264.196,00	100,06%	21,53%	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Medang Kampal)	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	6.503.843.826,00	1 unit kerja	1.322.666.293	1 Unit	1.429.618.000	0,06	77.597.903	-	0,00	0,00	0,06	77.597.903,00	1,06	1.400.264.196,00	106,43%	21,53%		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							418.337.950													
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota							418.337.950													
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					619 orang	37.800.000													
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4123	11.560.000													
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Perokok Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					28643 orang	13.500.000													
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					35 orang	15.029.000													
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					330 orang	600.000													
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 dokumen	103.260.000													
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	1.060.000													
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 dokumen	5.250.000													
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 dokumen	7.153.950													
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					13111 orang	6.900.000													















		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskasmas Purnama)	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	7.534.788.950,00	1 unit kerja	1.527.488.804	1 unit kerja	1.660.000.000	0,06	99.243.557	-	0,00	0,00	0,06	99.243.557,00	1,06	1.828.732.161,00	106,01%	21,31%
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							511.932.000											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk LKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							511.932.000											
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					781 orang	10.480.000											
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4811 orang	14.150.000											
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2017 orang	16.000.000											
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					47 orang	7.200.000											
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tergoda Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					389 orang	8.200.000											
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 dokumen	187.620.000											
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	1.300.000											
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 dokumen	8.400.000											
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 dokumen	63.319.250											
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (OOMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (OOMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					16690 orang	6.000.000											
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 dokumen	30.472.250											
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 dokumen	117.540.500											
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen	5.580.000											
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang	100.000											
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 dokumen	9.000.000											
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1 dokumen	4.200.000											
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi					2818 orang	20.400.000											
	1.02.05	PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita						3.046.500											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri						3.046.500											
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen	3.046.500											

Puskesmas Jayamukti									3.919.783.850	0,03	98.274.807,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,03	98.274.807,00	0,03	3.423.680.113,00	0,00%	0,23
A		01:02:01	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	16.064.701.204,00	100 %	3.325.385.006	3.325.086.850,00	0,03	98.274.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	98.274.807,00	100,03	3.423.680.113,00	100,03%	22,73%
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Jaya Mukti)	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	16.064.701.204,00	1 unit kerja	3.325.385.006	3.252.086.850	0,03	98.274.807	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	98.274.807,00	1,03	3.423.680.113,00	103,02%	22,73%
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT						660.035.000													
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						660.035.000													
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1968 orang	36.000.000													
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13566 orang	24.700.000													
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6269 orang	36.000.000													
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiw Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiw Berat Sesuai Standar				125 orang	21.000.000													
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tergoda Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1000 orang	5.800.000													
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 dokumen	140.560.000													
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 dokumen	300.000													
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 dokumen	10.000.000													
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 dokumen	57.725.000													
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (OOMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (OOMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				48478 orang	7.000.000													
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 dokumen	74.800.000													
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 dokumen	167.680.000													
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 dokumen	6.810.000													
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 orang														
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 dokumen	5.500.000													
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				1 dokumen	2.700.000													
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi				7201 orang	60.450.000													
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio penyandu per 1000 balia					7.850.000													



